

PARTISIPASI WANITA DALAM PEMBANGUNAN

Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat

Rini Rinawati**

Abstrak

Paradigma pembangunan Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang “top down” dengan istilah “Orthodox Paradigm” kepada pembangunan yang lebih menitikberatkan pada aspirasi dari masyarakat yang dikenal dengan “bottom up” atau “The Alternative Paradigm”. Pembangunan ini dinamakan sebagai Pembangunan Partisipatif. Ciri dari pembangunan ini adalah adanya perencanaan yang merupakan hasil dari rembuk bersama masyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Keikutsertaan dari seluruh masyarakat akan menjadi indikator keberhasilan dari pembangunan partisipatif ini, tidak ketinggalan juga wanita. Sebagai anggota masyarakat, wanita melalui berbagai lembaga kewanitaannya mempunyai hak yang sama dengan pria dalam menyukseskan pembangunan di lingkungannya. Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapinya.

Kata Kunci : Pembangunan Partisipatif, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Wanita.

1. Pendahuluan

Paradigma pembangunan Indonesia mulai bergeser dari pembangunan yang *top down* kepada pembangunan dari bawah (*bottom up*). Pembangunan tidak hanya bersifat linier dan tidak hanya melibatkan aparat pemerintah saja. Paradigma pembangunan menjadi “**Pembangunan Partisipatif**”. Hal ini dilandasi oleh UU No. 22/1999, tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25/1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

** **Rini Rinawati, Dra., M.Si.**, adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.

Dalam pembangunan yang menggunakan pendekatan *bottom up* (partisipatif) tersebut masyarakat menjadi ujung tombak dari sebuah pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat secara aktif berperan serta dalam menentukan arah pembangunan. Menurut Dedi Haryono, pendekatan partisipatif dalam pembangunan *bottom up* tidak hanya terbatas dalam pengertian “ikut serta” secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan masalah, mencari akar masalah, dan menentukan program pembangunan (dalam Makalah “Perencanaan Bersama Masyarakat”, DPP INKINDO Prop. Jawa Barat; 2003).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang dimaksud tersebut di atas akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan masyarakat untuk mandiri. Selanjutnya, pendekatan partisipatif dalam pembangunan yang *bottom up* (partisipatif) tersebut, menurut Dedi, disebut juga dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih mampu dalam mengkaji masalah atau kebutuhan sendiri, serta memikirkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif diindikasikan oleh adanya kemampuan masyarakat dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Adapun tahapan yang dalam proses pemberdayaan masyarakat ini adalah :

- a. Dimulai dengan masyarakat yang apatis, yaitu mereka menyadari adanya masalah akan tetapi merasa tidak mampu mengatasinya,
- b. Menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah.
- c. Tahap pembebasan, dimana masyarakat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah.
(Modul Pelatihan, “Survey Kampung Sendiri,” Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung: 2001)

Dengan demikian, yang dimaksud partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam

dirinya maupun dari luar dirinya dalam seluruh proses kegiatan. Adapun asas-asas dalam pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. *Asas Solidaritas*, dalam arti setiap kegiatan pembangunan harus terfokus dengan jelas ditujukan untuk siapa. Solidaritas ini dituntut tidak hanya antarmasyarakat, tetapi juga antara masyarakat dengan pelaku pembangunan lainnya.
- b. *Asas Partisipasi*, dalam arti setiap pelaku pembangunan yang terlibat bertindak secara aktif dengan berlandaskan satu tekad yang telah disepakati bersama.
- c. *Asas Kemitraan*, dalam arti interaksi antarpelaku pembangunan yang terjadi adalah interaksi antara pihak yang setara meskipun berbeda fungsi, sehingga akan terbentuk kerabat pembangunan.
- d. *Asas Memampukan*, dalam arti agar masyarakat dapat mencapai apa yang diinginkan, maka kegiatan pembangunan ini harus dapat mengarahkan para pelaku pembangunan untuk menunjang dan mendukung hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri.
- e. *Asas Pemerataan*, dalam arti pembangunan harus menekankan pemerataan bagi orang dalam memanfaatkan peluang.
(Usulan Teknis, “Pendampingan Perumahan Swadaya”, Tri Exnas, 2005)

Ciri-ciri dari kegiatan yang menggunakan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat, menurut Dedi Haryono, adalah sebagai berikut:

- a. Ide atau gagasan kegiatan program dilakukan oleh masyarakat sendiri.
- b. Identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan oleh masyarakat sendiri.
- c. Pemanfaat hasil program adalah masyarakat sendiri.
- d. Tidak berpihak kepada satu golongan tertentu.
(dalam Makalah “Perencanaan Bersama Masyarakat”, DPP INKINDO Prop. Jawa Barat; 2003)

Dalam proses pembangunan partisipatif tersebut, terdapat beberapa elemen atau unsur yang akan terlibat di dalamnya, yaitu pihak pemerintah daerah melalui tim teknis yang terdiri dari perwakilan instansi terkait, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi profesi, serta kelompok-

kelompok warga di tingkat desa/kampung. Dengan demikian, wanita sebagai bagian dari anggota masyarakat yang merupakan ujung tombak dari proses pembangunan partisipatif tersebut juga menjadi sangat penting keberadaannya. Hal ini sesuai dengan amanat yang telah digariskan GBHN, yang menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut maka menarik untuk dikaji mengenai masalah :”*Bagaimana Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif*”.

Dari permasalahan tersebut maka terdapat beberapa pertanyaan;

- a. Apa peranan wanita dalam pembangunan partisipatif?
- b. Apa kendala-kendala bagi wanita dalam pelaksanaan peranan wanita dalam pembangunan partisipatif?

2. Kerangka Teoretis

Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana menjadi menonjol sejak selesainya Perang Dunia II. Bagi negara yang baru terlepas dari belenggu penjajahan dan kemudian merdeka, menjadi suatu keharusan untuk mengadakan suatu pembangunan bagi negaranya. Pembangunan itu sendiri bertujuan untuk secepatnya mengejar ketinggalan dari negara maju. Paradigma pembangunan Indonesia sendiri pada awalnya memandang pembangunan sebagai suatu perspektif yang tunggal dan evolusioner. Dalam paradigma ini pembangunan diartikan sebagai “jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik” (Roger & Shoemaker, dalam Nasution, 1996 : 28).

Sebagai upaya yang bersifat evolusioner dan dalam rangka mengejar ketinggalan dari negara maju, maka suka tidak suka, disadari atau tidak disadari, paradigma pembangunan identik dengan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Dan pembangunan ekonomi dipandang sebagai strategi investasi.

Namun, pembangunan ini banyak mendapat kritikan, karena ternyata pembangunan yang hanya menitikberatkan pada sektor ekonomi telah

membawa berbagai akibat negatif, seperti kerusakan alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi (Tjokrowinoto, 1996;9).

Lahirilah konsep-konsep mengenai pembangunan yang hanya menitik beratkan pada sektor ekonomi, di mana perencanaan dari pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparatnya. Dalam paradigma pembangunan di atas, masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan. Masyarakat sebagai objek tidak diikutsertakan dalam pembangunan tersebut. Mereka hanya menikmati hasilnya saja. Celakanya, pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat tersebut seringkali tidak dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan perencanaan dari pembangunan tersebut bukan merupakan kebutuhan yang lahir dari masyarakat, tetapi merupakan kebutuhan segelintir orang dengan berbagai kepentingan.

Dalam rangka misi otonomi daerah, ada harapan bahwa pembangunan dapat menjadi satu arena interaksi berbagai pihak yang sudah barang tentu dengan memakai landasan prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Ditinjau dari sudut pandang sebagai proses bersama, proses tersebut secara bersamaan akan menjadi satu media pemberdayaan warga. Era otonomi daerah, sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, memang memberikan peluang bagi setiap pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, berdasarkan potensi dan masalah yang ada di daerahnya.

Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang *output*, hasil pembangunanpun akan lebih bermanfaat karena merupakan hasil kesepakatan bersama, karena tanpa adanya kesepakatan bersama tersebut, produk pembangunan hampir dapat dipastikan akan tanpa makna.

Telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, akan banyak disadari kesepakatan-kesepakatan yang diambil bersamaan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemantapan. Dengan demikian, adanya wadah koordinasi, baik dalam kelembagaan penanganan maupun dalam pengambilan keputusan, menjadi sangat vital dan penting perannya dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan tersebut.

Prinsip dasar konsep pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, alih-alih sebagai pembangunan, bertumpu pada masyarakat meliputi :

1. *Pembangunan kota yang komprehensif*

Upaya penataan kawasan (masyarakat) harus dipandang sebagai proses pembangunan suatu lingkungan dengan cara sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah daerah.

2. *Membangun tanpa menggusur.*

Proses pembangunan kawasan diharapkan tidak menggusur masyarakat, baik secara langsung (*displacement*) maupun tidak langsung/bertahap (*gentrification process*). Bila penduduk akan digusur, maka harus ada suatu kebijaksanaan yang jelas mengenai bentuk penanganan yang ditentukan berdasarkan aspirasi penduduk.

3. *Memberdayakan masyarakat dan membangun dari dalam*

Pengelolaan sumber daya dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam menggali bakat, potensi, kemampuan, kelebihan yang sudah atau mungkin belum terlihat secara jelas, sehingga akan tercipta partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan tersebut.

4. *Berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi.*

(Usulan Teknis, Pendampingan Perumahan Swadaya, Tri Exnas, 2005)

Peran pemerintah dalam pembangunan yang pada awalnya sebagai “*provider*” atau penyedia/pemberi, pada perkembangan selanjutnya menjadi “*enabler*”, yaitu sebagai pendorong atau fasilitator. Selanjutnya pembangunan yang menggunakan pendekatan *top down* dimana pemerintah sebagai *provider* sering disebut sebagai “*orthodox paradigm*”, sementara pembangunan dengan pendekatan *bottom up* di mana pemerintah bertindak sebagai pendorong atau sebagai fasilitator dikenal dengan istilah “*the alternative paradigm*”. Kita dapat melihat perbedaan dari dua paradigma pembangunan tersebut, yaitu:

Gambar 1
Perbedaan Paradigma Pembangunan antara
“Orthodox Paradigm” dengan “The Alternative Paradigm”

Orthodox Paradigm	The Alternative Paradigm
Tujuan utama adalah peningkatan GNP	Tujuan utama adalah mengelola SDA menuju pembangunan yang berkelanjutan
Masyarakat menjadi objek pembangunan	Masyarakat menjadi subjek pembangunan
Profesionalisme diartikan sebagai pemikiran yang pragmatis	Profesionalisme diartikan sebagai pemikiran yang bersifat kemanusiaan dan idealistik
Mengedepankan ketergantungan	Mengedepankan pemberdayaan
Mengedepankan teknologi tinggi	Mengedepankan teknologi tepat guna
Lebih mengutamakan "out put"	Lebih mengutamakan "outcomes"
Adanya sentralisasi	Adanya desentralisasi
Lebih mengedepankan standardisasi	Lebih mengedepankan fleksibilitas dan keanekaan (<i>variety</i>) sesuai dengan kebutuhan setempat
Lebih mengedepankan industri formal	Lebih mengedepankan industri informal dengan dukungan usaha kecil

Sumber : Laporan akhir

Dengan demikian, pembangunan partisipatif adalah suatu pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreativitas dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kawasan atau lingkungannya. Hal ini sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh Hikmat, (2001:101), yaitu :

Pada pembangunan partisipatif, proses pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme tertentu yang telah disepakati bersama, suatu metode yang telah dikenal masyarakat dan diberi nuansa baru dengan teknologi baru yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat,

merencanakan pembangunan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat.

Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari penerapan pembangunan partisipatif ini adalah sebagai berikut:

- Diterapkannya proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif.
- Kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan visi dan misi serta aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- Rencana tindak (*action plan*) pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- Rencana tindak pengembangan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan perangkat perundangan yang menunjang proses pembangunan daerah (Program Dasar, 2003;1).

Dari berbagai uraian tentang pembangunan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya wanita, akan dituntut peran sertanya. Memang, pengakuan terhadap pentingnya peranan wanita dalam pembangunan semakin meningkat, karena wanita merupakan kelompok yang mewakili separuh dari penduduk dunia. Dari segi pembangunan, hal ini berarti bahwa mereka merupakan lebih separuh dari pelaku pembangunan dan lebih separuh dari pemanfaat hasil pembangunan. Terdapat 5 (lima) kriteria pembangunan wanita, yaitu :

- a. Penguasaan/kontrol
- b. Partisipasi aktif
- c. Penyadaran
- d. Akses
- e. Kesejahteraan (Suprpto, 1993;6).

Dari kelima kriteria tersebut yang relevan dengan penulisan ini adalah adanya kesamaan partisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi mengandung pengertian turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau juga diartikan sebagai keikutsertaan atau peran serta dalam kegiatan. Dalam perkembangannya lahirlah konsep "Wanita dalam Pembangunan" yang sering disebut sebagai "*Women in Development*" (WID), dengan agenda

utamanya, yaitu bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan.

Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Berkenaan dengan peran wanita dalam pembangunan dapat dilihat pada berbagai teori tentang wanita dalam kaitannya dengan pembangunan yang dijelaskan oleh Suprpto (1993; 17-26), di antaranya sebagai berikut :

1) Teori Alamiyah.

Dasar dari teori ini adalah pengetahuan biologis yang digunakan untuk menerangkan perbedaan sosiopolitis antara wanita dan pria. Atas dasar perbedaan biologis tersebut, maka kondisi sosial wanita pun berbeda dari pria. Menurut teori ini, wanita terutama berkenaan dengan struktur biologisnya dianggap membutuhkan perlindungan dari pria, sehingga pada gilirannya wanita berada pada posisi di bawah pria. Teori ini bersifat statis, karena secara kategoris tidak memberikan perubahan pandangan mengenai struktur hubungan antara wanita dan pria, yang ditunjukkan dengan tidak memberikan peluang bagi kesejajaran (*equality*) antara wanita dan pria.

2) Teori Evolusi Fungsional

Teori yang didasari pemikiarn Spencer (1820-1903) melihat bahwa masyarakat berubah melalui proses adaptasi fisik terhadap lingkungannya atas dasar “yang kuat bertahan” (*survival of the fittest*). Menurut Spencer, perkembangan manusia yang makin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup berakar pada makin efisiensinya pembagian kerja yang dilakukan, termasuk pembagian kerja menurut gender. Dianggap, makin tinggi peradaban, makin terjadi differensiasi kerja wanita dan pria. Spencer berpendapat bahwa kedua jenis kelamin bukan saja berbeda tetapi juga harus “tidak setara”. Wanita dianggap makin cocok bagi kerja domestik dan makin tidak cocok untuk kerja lainnya. Karena hanya pria yang terus berkembang dan memiliki ciri-ciri untuk kehidupan di luar rumah.

3) Teori Ekonomi

Menurut teori ini, siapa yang memiliki kontrol terhadap sarana produksi, maka miliki kuasa dan melakukan pembenaran terhadap rancangan ekonomi, sosial, dan politik, yang dapat mempertahankan kekuasaan.

Adapun pokok-pokok pikiran teori ini mengenai wanita dan perannya dalam pembangunan adalah :

- a. Perkembangan industrialisasi dan pergeseran ke arah ekonomi kapitalis menunjukkan makin lebarnya jurang kekuasaan dan nilai wanita dan pria. Pekerjaan rumah tangga dianggap tidak sentral dan tidak memiliki nilai ekonomi.
- b. Asumsi masyarakat: bahwa kerja yang pantas bagi wanita adalah jenis kerja yang mirip dengan tugas-tugas wanita dalam keluarga. Bahkan, ada anggapan bahwa kesetaraan bagi wanita di pasaran tenaga kerja atau wanita dapat mencari kerja hanya setelah urusan pemeliharaan atas di atasi.
- c. Adanya pembagian atau differensiasi kerja, kekuasaan, dan kontrol.
- d. Definisi ideologis mengenai peranan wanita sering kali justru timbul dari ketentuan pelembagaan pembagian kekuasaan, sehingga makin terpisahnya kegiatan produktif dari kegiatan domestik. Berkembang kerangka ideologis mengenai wanita yang digambarkan sebagai “lemah gemulai”.

4) Teori “Enlightment”

Teori yang berkembang atas dasar argumen dari John Locke (1672-1704) ini menganggap bahwa manusia diciptakan Tuhan sejajar, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tiap individu secara hakiki memiliki kemerdekaan dan kebebasan dan setara, mereka tidak boleh dibatasi oleh kondisi kelahiran (biologis) dan memiliki potensi yang tidak terbatas untuk berkembang. Teori ini tulang punggung dan dasar utama bagi gerakan feminisme liberal di Barat dan di dunia internasional.

Dari perspektif teori ini, kunci utama yang dapat mengubah keadaan ketidakadilan gender adalah pendidikan dan perkembangan kemampuan nalar secara rasional. Pandangan utama teori ini adalah menciptakan kondisi kesetaraan hak (*equal rights*) wanita dan pria dalam kerangka sosial yang ada melalui proses sosialisasi.

Walaupun teori ini telah meletakkan dasar pergerakan feminisme, namun terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

- a. Tidak memberikan gambaran mengenai perubahan historis, terutama karena sifatnya yang linier.
- b. Tidak memberikan gambaran faktor-faktor penyebab perubahan peranan dan status wanita.

- c. Tidak menunjukkan apa yang mendorong ataupun menarik timbulnya gerakan perubahan.
- d. Pertimbangan perbedaan budaya tidak dilakukan.

5) Teori Pertentangan Kelamin

Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa hubungan kekuasaan antar jenis kelamin/gender merupakan hasil dari pertentangan antar jenis kelamin, di mana wanita saat ini berada di bawah pria. Pemuka teori ini salah satunya adalah Freud dengan pemikiran “*penis-envy*”-nya. Para ahli dalam pemikiran teori ini menganggap bahwa kekuasaan tidak dapat dipertahankan tanpa perjuangan. Oleh karena itu, teori ini meletakkan dasar bagi pergerakan dalam rangka usaha yang dilakukan untuk memperoleh hak dan perluasan kekuasaan untuk wanita dalam kegiatan pemerintahan dan sektor lainnya yang didominasi pria. Argumen yang sering dipakai adalah bila pria memaksa wanita hanya untuk jadi objek seks, maka wanita akan menggunakan kondisi seksualnya dan kecantikannya untuk melawan pria. Jalan keluarnya adalah pemberian harkat manusia pada wanita dan pria secara bersama-sama untuk merdeka dan setara.

Kelima teori yang telah dijelaskan di atas menerangkan bagaimana masyarakat mengembangkan berbagai struktur kekuasaan dan struktur hubungan antara pria dan wanita dalam kaitannya dengan pembangunan. Dalam perkembangan saat ini, khususnya di Indonesia, dengan adanya paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada proses “*bottom up*” atau pembangunan partisipatif, maka diharapkan hubungan antara wanita dan pria dalam pembangunan menjadi setara, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini dijelaskan dalam GBHN, yang mengisyaratkan bahwa :

Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.

3. Pembahasan

Paradigma pembangunan partisipatif dilandasi oleh UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Lebih jauh dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Permendagri No. 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan produk perencanaan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan yang *bottom up* (partisipatif) tersebut, pemerintah mencoba melaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif lebih berorientasi pada proses. Masyarakat diajak untuk mengetahui, memahami tentang pentingnya aspek partisipasi masyarakat pembangunan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu kepada rakyat (*people centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ialah upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya yang tertinggal (*grass root*) agar tidak tertinggal dalam pembangunan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif diperlukan adanya kelembagaan masyarakat (*institutional building*) dalam rangka menciptakan alam yang kondusif (*internal dan eksternal*) sehingga tercipta akses dan peluang bagi masyarakat lapis bawah (*grass root*). Di samping itu, diperlukan pula adanya pembangunan organisasi untuk menggalang potensi kelompok dan memberikan wadah kerjasama (internal dan eksternal). Pembangunan manusia, individu, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan mempunyai implikasi, agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat atau *stakeholder*). Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan indikator aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi masyarakat.

Yang dimaksud dengan aktualisasi diri adalah ekspresi diri setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tahap dialog (FGD), penemuan, dan pengembangan, untuk program selanjutnya.

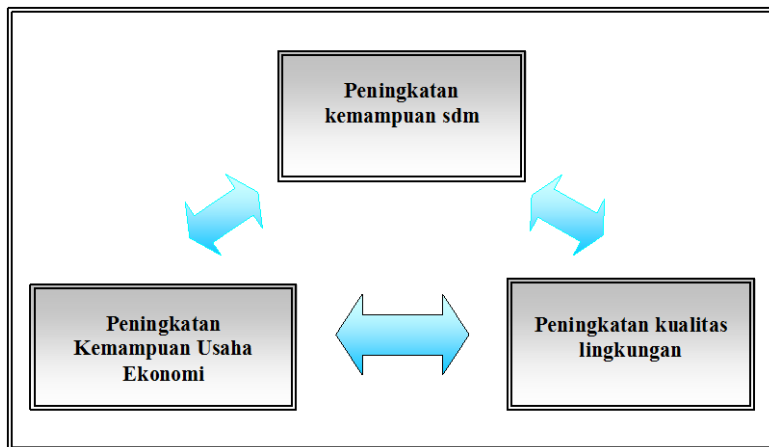
Juga, internalisasi penilaian yang merupakan hasil ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok. Sementara, koaktualisasi diri, merupakan perilaku yang menunjukkan adanya aktualisasi bersama dalam masyarakat yang berimplikasi pada eksistensi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya.

Adapun asas Pemberdayaan Masyarakat, adalah :

- ≈ Solidaritas.
- ≈ Partisipasi.
- ≈ Kemitraan.
- ≈ Memampukan
- ≈ Pemerataan. (Tri Exnas, 2005)

Pada gilirannya dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan konsep Tridaya, yaitu Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana, dalam prosesnya akan saling mendukung satu dengan lainnya. Secara skematik keterkaitan antar unsur dalam Tridaya digambarkan seperti ini :

Gambar 2.
Konsep Tridaya

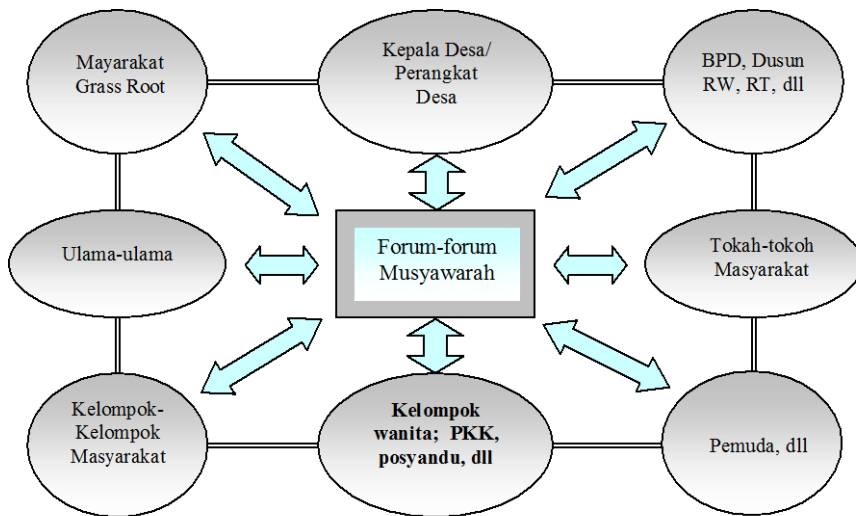


Sumber : Tri Exnas, 2005

Model Pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif melalui pendekatan Tridaya melibatkan berbagai pihak. Hal ini merupakan ciri khas dari model pemberdayaan dalam pembangunan yang bertumpu kepada rakyat (*people centered development*). Keterlibatan banyak pihak dalam konsep pemberdayaan ini, pada akhirnya akan berperan penting dalam keberhasilan program yang dilaksanakan.

Adapun model dari pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 3
Model Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Tri Exnas, 2005

Pada model pemberdayaan di atas, maka kita dapat melihat bagaimana kelompok perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat menjadi terlibat dalam proses pembangunan partisipatif. Hal ini dapat dilihat pada

proses pemberdayaan yang melibatkan kelompok wanita dalam setiap tahapannya:

1) Membangun Komitmen

Pada dasarnya, tujuan tahap ini adalah membangun kepercayaan satu sama lainnya (*mutual trust*) dan kemitraan yang akan menjadi dasar pijakan relasi antara individu/kelompok masyarakat dan pihak yang berkepentingan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Dalam tahap ini, setiap anggota masyarakat dalam hal ini wanita yang tergabung dalam berbagai kelompok atau organisasi yang ada di tingkat RT, RW, maupun desa/kota diharapkan turut serta dalam proses membangun komitmen ini. Proses yang dilakukan dalam rangka membangun komitmen ini dilakukan melalui komunikasi yang menitikberatkan pada musyawarah atau kesepakatan. Komunikasi yang dilakukan dalam tahapan ini adalah FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan partisipan-partisipan untuk melakukan pertukaran pesan sebagai upaya membangun komitmen bersama dalam pembangunan partisipatif.

2) Pengorganisasian Masyarakat

Tujuan tahap pengorganisasian tiada lain untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menetapkan anggota-anggota masyarakat tertentu sebagai kelompok masyarakat sasaran. Anggota-anggota masyarakat tersebut selanjutnya diorganisir dalam wadah kelompok masyarakat yang bentuk pengelolaan kegiatan dan lain-lainnya ditetapkan oleh mereka sendiri. Peran aparat atau pihak lainnya tidak lebih sebagai fasilitator. Dalam proses verifikasi ini kelompok atau organisasi wanita akan terlibat langsung di dalamnya.

3) “Assesment” Kebutuhan.

Isu penting tahap ini adalah mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan individual menjadi kebutuhan kelompok masyarakat. Selanjutnya, visi tersebut menjadi tujuan akhir kelompok yang akan diwujudkan melalui serangkaian kegiatan. Dalam setiap jenjang pemerintahan, maka akan ada kelompok atau organisasi kewanitaan apa itu PKK, Posyandu, Posbindu, atau yang lainnya. Dengan adanya perbedaan kelompok dan kebutuhan ini tentunya akan mempengaruhi pula kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 3 (tiga) jenis kebutuhan masyarakat yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini, yaitu :

- *Felt Needs* (kebutuhan yang dirasakan masyarakat pada saat tertentu)
- *Actual Needs* (kebutuhan nyata, saat ini, yang sering tidak dirasakan atau disadari)
- *Anticipated Needs* (kebutuhan yang akan dirasakan diwaktu mendatang)

4) Perencanaan Kegiatan.

Hasil *assessment* kebutuhan akan memberikan gambaran sekaligus pijakan, tentang orientasi sasaran pembangunan komunitas. Dengan demikian, dapat dibuat rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan kelompok masyarakat. Termasuk dalam perencanaan kegiatan adalah anggaran, rencana pembiayaan, sumber-sumber pendanaan, langkah-langkah strategis, tahap-tahap pekerjaan teknis, pembagian peran, dan tugas serta kemungkinan sumber daya dan hambatan.

5) Pelaksanaan

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, pembangunan dilaksanakan. Pada tahap ini, perubahan dan pergeseran dari rencana semula sangat mungkin terjadi. Selama perubahan terjadi dalam jumlah dan frekuensi yang wajar, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam pelaksanaan ini partisipasi aktif dari para wanita yang tergabung dalam kelompok atau organisasi tersebut menjadi sangat penting. Adapun tingkatan partisipasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pembangunan



Sumber : Haryono, 003 :5

Melihat pada bagan tersebut, wanita dapat berpartisipasi dalam pembangunan tidak hanya sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri, akan tetapi pada konsep pembangunan partisipatif wanita dapat berpartisipasi sampai pada perencanaan dari arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya, bahkan pada tahap evaluasi pun wanita akan tetap berpartisipasi.

6) Evaluasi

Pada prinsipnya, evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga harus memperoleh gambaran tentang tingkat kemandirian kelompok masyarakat. Hasil evaluasi adalah gambaran keberhasilan kelompok serta berbagai rekomendasi untuk memperkuat kelompok masyarakat pada tahap selanjutnya. Pada tahapan akhir dari pemberdayaan masyarakat ini pun wanita akan menentukan bagaimana kontrol yang dilakukan para wanita tersebut, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, dalam konsep pembangunan partisipatif, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat, maka wanita sebagai anggota masyarakat setempat dipandang sebagai subjek dalam seluruh proses melalui keputusan-keputusan yang didasarkan pada beberapa hal yaitu :

- ♦ **A** (Aspirasi)
- ♦ **K** (Kemampuan)
- ♦ **K** (Kebutuhan)
- ♦ **U** (Upaya Masyarakat)

Dalam kenyataan di lapangan, pada proses pembangunan partisipatif yang dilakukan para wanita melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering ditemui di lapangan, antara lain:

1. Wanita secara psikologis terbiasa dengan kondisi sebagai bagian masyarakat yang terpinggirkan, sehingga kesadaran untuk turut serta dalam proses pembangunan partisipatif yang dimulai dari perencanaan menjadi tidak maksimal.

2. Kondisi tersebut juga ditunjang oleh kebiasaan “dicekoki” sebagai warisan dari konsep pembangunan yang *top down*, sehingga wanita belum siap bertindak sebagai subjek yang menentukan arah dari pembangunan di lingkungannya.
3. Masih banyaknya para wanita yang tidak berani untuk tampil ke depan dan mengemukakan pikiran atau ide-idenya, sehingga mereka seringkali hanya meng“ya”kan perencanaan dan pelaksanaan yang dikemukakan oleh para pria.

4. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan yang ditunjang oleh berbagai teori yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanita sebagai bagian dari masyarakat melalui berbagai kelompok atau organisasi yang ada di lingkungannya memiliki peranan yang sangat penting dalam paradigma pembangunan partisipatif, khususnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
 2. Proses pemberdayaan masyarakat tersebut dapat menjadi peluang bagi wanita untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan perencanaan pembangunan sampai pada mengevaluasi hasil dari pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan.
 3. Pada pelaksanaan di lapangan, partisipasi wanita dalam pembangunan partisipatif masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemui kendala, seperti kebiasaan, kesiapan, dan kesediaan dalam melibatkan diri dalam proses pembangunan partisipatif.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, Dedi. 2003. "Perencanaan Bersama Masyarakat", *Makalah* dalam rangka Sosialisasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif, DPP INKINDO Prop. Jawa Barat, Bandung, 2003
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategy Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kerangka Acuan Kerja; 2004. "Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Prasarana Lingkungan Perumahan/Pemukinan Partisipatif di Kabupaten Bandung", 2004
- Lembaran Daerah Kabupaten Bandung, No 40 tentang: *Peraturan Daerah dan Pola dasar Pembangunan Daerah tahun 2001 – 2005*, Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bandung, 2001
- Laporan Akhir, 2004. *Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung, 2004
- Modul Pelatihan Tim Survey Kampung Sendiri, *Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Menengah*, Dinas Kimtawil, Kabupaten Bandung, 2004
- Modul *Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan RP4D*, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Ditjen Perkim, Jakarta, 2001
- Petunjuk *Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Perkotaan dan Pedesaan (dengan konsep Tridaya)*, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, 2001
- Rogers, Everett.M, 1984, *Komunikasi dan Pembangunan; Perspektif Kritis*, Jakarta, LP3ES.
- Suprpto, Riga Adiwoso. 1993. "Kerangka Pembangunan Wanita: Feminisme dalam Perspektif Historis", *Makalah* dalam "Palatihan bagi Pelatih Inti mengenai Gender dan Pembangunan, Kantor Meneg UPW, Cisarua, 1993
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan; Dilema dan Tangtangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Tri Exnas, 2005. *Usulan Teknis Pekerjaan Pendampingan Masyarakat Perumahan Swadaya*, Dept. Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, Satuan Kerja Sementara Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jawa Barat, bandung, 2005